

## **BAB I**

### **PENDUHLUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu Kota Provinsi daerah tingkat I Jawa Barat. luas wilayah Kota Bandung saat ini adalah 16.729,65 ha, terbagi dalam wilayah administratif 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.578 rukun warga (rw), dan 9.843 rukun tetangga (rt). Permasalahan yang ada di kota bandung saat ini salah satunya adalah sampah yang belum terselesaikan secara tuntas.

Jika melihat penjabaran dari salah satu visi Kota Bandung yaitu ” terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera” poin nyaman yaitu terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan keadaan lingkungan yang saat ini sedang terjadi di kota bandung. ternyata mengenai efektivitas kebersihan di kota bandung masih bisa dikatakan belum efektif dengan dibuktikan melalui data dari PD. Kebersihan Kota Bandung sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sampah**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Volume Sampah (Ton)</b>	<b>Kapasitas Pengangkutan (Ton)</b>	<b>Sisa Volume Sampah (Ton)</b>
1	2011	347,027	290,020	57,007
2	2012	375,656	310,600	65,056
3	2013	377,786	300,750	77,036
4	2014	305,691	280,675	25,016
5	2015	296,505	278,470	18,035
6	2016	335,884	278,780	57,104

Sumber: Pd Kebersihan Kota Bandung

Menurut data dari PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2011 berjumlah 347,027 ton dengan kapasitas pengangkut sebesar 290,020 ton dan sisa volume sampah sebesar 57,007 ton, meningkat pada tahun 2012 menjadi 375,656 ton dengan kapasitas pengangkut sebesar 310,600 ton dan sisa volume sampah sebesar 65,056, meningkat kembali sebesar 377,786 dengan kapasitas pengangkut sebesar 300,370 ton dan volume sampah sebesar 77,030, pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 menurun menjadi 305,691 ton dengan kapasitas pengangkut sebesar 280,675 ton dan sisa volume sampah sebesar 25,016 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 296,505 ton dengan kapasitas pengangkut sebesar 278,470 ton dan sisa volume sampah sebesar 18,035 ton namun pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar 335,884 ton dengan kapasitas pengangkut sebesar 278,780 dan sisa volume sampah sebesar 57,104.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara volume sampah yang harus diangkut dengan kapasitas pengangkutan sehingga masih menyisakan sampah yang belum dapat diangkut, sehingga hal tersebut menjadikan suatu masalah bagi PD. Kebersihan Kota Bandung setiap tahunnya. Berikut data terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD Kebersihan Kota Bandung:

**Tabel 1.2**  
**Sarana Dan Prasarana Pd Kebersihan Kota Bandung**

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi Existing
1	Truk	105
2	Kendaraan Kecil	12
3	Trida	50
4	Container	203
5	Mesin Press	2

*Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung*

Melihat jumlah dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD Kebersihan yaitu truk sebanyak 105 unit, kendaraan kecil sebanyak 12 unit, trida sebanyak 50 unit, container sebanyak 203 unit, dan mesin press sebanyak 2 unit.

Bukan hal aneh jika melihat jumlah sampah yang terus meningkat, mengingat Kota Bandung merupakan kota besar yang padat penduduk. Terlebih lagi Kota Bandung memiliki banyak industri dan juga tempat wisata yang tentu saja hal ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya sampah. Berikut tabel

yang membandingkan persentase sumber sampah di Kota Bandung berdasarkan jenisnya:

**Tabel 1.3**  
**Sumber Sampah Di Kota Bandung**

No	Sumber Sampah	Organik	An Organik
1	Rumah Tinggal	56%	44%
2	Non Rumah Tinggal	48%	52%
3	Rata-Rata Sampah Di Kota Bandung	52%	48%

*Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung*

Sumber sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari sampah rumah tinggal organik 56% dan anorganik 44% sedangkan non rumah tinggal organik 48% dan anorganik 52%. Sampah rumah tinggal merupakan sampah yang berasal dari rumah yang ditinggali, dan sampah non rumah tinggal merupakan sampah yang berasal dari fasilitas umum. Sampah anorganik/kering adalah sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Sampah organik/basah, adalah sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami.

Terkait permasalahan sampah tersebut di Kota Bandung memiliki 159 TPS yang tersebar di seluruh Kota Bandung namun sayangnya tidak memiliki TPA sehingga PD Kebersihan Kota Bandung ikut membuang sampah ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat Desa Sarimukti Kabupaten Bandung Barat yang mulai beroperasi pada tanggal 28 Mei 2006 dengan luas tpa 25ha.

Sebenarnya mengenai masalah sampah di Kota Bandung sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. namun pada implementasinya belum sesuai dengan yang di harapkan di

dalam peraturan daerah tersebut semisal pasal 57 perda nomor 9 tahun 2011 sebagai berikut, setiap orang dilarang:

1. Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan;
2. Mencampur Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dengan Sampah B3 Rumah Tangga;
3. Mengelola Sampah Yang Menyebabkan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan;
4. Melakukan Penanganan Sampah Dengan Pembuangan Terbuka Di Tempat Pemrosesan Akhir;
5. Membuang Sampah Kotoran, Atau Barang Bekas Lainnya Disaluran Air Atau Selokan, Jalan, Bahu Jalan, Trotoar, Tempat Umum, Tempat Pelayanan Umum, Dan Tempat-Tempat Lainnya;
6. Mengotori, Merusak, Membakar, Atau Menghilangkan Tempat Sampah Yang Telah Disediakan;
7. Membakar Sampah Pada Tempat-Tempat Yang Membahayakan;
8. Membakar Sampah Atau Benda-Benda Lainnya Di Bawah Pohon Yang Menyebabkan Matinya Pohon;
9. Membakar Sampah Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah.

PD Kebersihan Kota Bandung Pun Telah Melakukan Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Seperti Di Jelaskan Dalam Tabel Sebagai Berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011**

No	Media/ Lembaga	Jumlah Talkshow
1	Radio	13
2	Tvri	35
3	Sekolah	5
4	Mesjid	1
5	Kelurahan	23
6	Rw	9
7	Rt	3
8	Instagram	291
9	Facebook	100
10	Twitter	2500

*Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung*

Pada Tahun 2011 Sosialisasi Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dilakukan Melalui 10 Media/Lembaga. Talkshow Melalui Radio Dilakukan Sebanyak 13 Kali, Talkshow Melalui Tvri Dilakukan Sebanyak 35 Kali, Talkshow Melalui Sekolah Dilakukan Sebanyak 5 Kali, Talkshow Melalui Rmasjid Dilakukan Sebanyak 1 Kali, Talkshow Melalui Kelurahan Dilakukan Sebanyak 23 Kali, Talkshow Melalui Rw Dilakukan Sebanyak 9 Kali, Talkshow Melalui Rt Dilakukan Sebanyak 3 Kali, Talkshow Melalui Instagram Dilakukan Sebanyak 291 Kali, Talkshow Melalui Facebook Dilakukan Sebanyak 100 Kali, Talkshow Melalui Twitter Dilakukan Sebanyak 2500 Kali.

**Tabel 1.5**  
**Sosialisai Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah**  
**Pada Tahun 2013-2015**

No	Objek Sosialisasi	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kecamatan/ Kelurahan/ Rw/Rt	34	42	25
2	Lembaga Pendidikan	30	59	19
3	Media Cetak	238	141	59
4	Media Elektronik	19	45	45
5	Ormas/Lsm	123	107	42
6	Pameran	1	2	2
7	Pedagang Kaki Lima	70	-	-

Pada Tahun 2013 Sosialisasi Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dilakukan Melalui 7 Media/Lembaga Yaitu: Kecamatan/ Kelurahan/ Rw/Rt Sebanyak 34 Kali, Lembaga Pendidikan 30 Kali, Media Cetak 238 Kali, Media Elektronik 19 Kali, Ormas/Lsm 123 Kali, Pameran 1 Kali, Pedagang Kaki Lima 70 Kali. Kemudian Pada Tahun 2014 Sosialisasi Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dilakukan Melalui 7 Media/Lembaga Yaitu: Kecamatan/ Kelurahan/ Rw/Rt Sebanyak 42 Kali, Lembaga Pendidikan 59 Kali, Media Cetak 141 Kali, Media Elektronik 45 Kali, Ormas/Lsm 107 Kali, Pameran 2 Kali. Pada Tahun 2015 Sosialisasi Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dilakukan Melalui 7 Media/Lembaga Yaitu: Kecamatan/ Kelurahan/ Rw/Rt Sebanyak 25 Kali, Lembaga Pendidikan 19 Kali, Media Cetak 59 Kali, Media Elektronik 45 Kali, Ormas/Lsm 42 Kali, Pameran 2 Kali.

Melihat Permasalahan-Permasalahan Tersebut Membuktikan Bahwa Pemerintah Kesulitan Menghadapi Permasalahan Sampah Di Kota Bandung. Oleh Karena Tu Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul ‘Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung’.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang Diuraikan Diatas, Maka Peneliti Dapat Mengidentifikasi Masalah Sebagai Berikut:

1. Padatnya Jumlah Penduduk Yang Berdampak Pada Bertambahnya Sampah Di Kota Bandung.
2. Masih Tingginya Volume Sampah Yang Tidak Dapat Diangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir
3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Dalam Pembuangan Sampah Di Kota Bandung.
4. Kurangnya Jumlah TPA Maupun TPS Di Kota Bandung.
5. Masih Rendahnya Sanksi Yang Diberikan Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan.
6. Kurangnya Tenaga Ahli Dalam Pelaksanaan Kebijakan PD Kebersihan Kota Bandung.
7. Kurangnya Penegakan Oleh Aparatur Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan
8. Kurangnya Kerjasama Antara Pihak PD Kbersihan Dengan Masyarakat.

9. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membuang Sampah Sembarangan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah Yang Diuraikan Diatas, Maka Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Seberapa Besar Pengaruh Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
2. Seberapa Besar Pengaruh Sumberdaya Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
3. Seberapa Besar Pengaruh Hubungan Antar Organisasi Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
4. Seberapa Besar Pengaruh Karakteristik Agen Pelaksana Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
5. Seberapa Besar Pengaruh Kondisi Sosial,Politik, Ekonomi Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
6. Seberapa Besar Pengaruh Disposisi Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?
7. Seberapa Besar Pengaruh Standar Dan Sasaran, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Disposisi Dalam Variabel Implementasi Kebijakan (No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai Dengan Rumusan Masalah Yang Telah Ditetapkan Diatas, Maka Penelitian Ini Bertujuan Untuk:

1. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Sumberdaya Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Hubungan Antar Organisasi Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
4. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Karakteristik Agen Pelaksana Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
5. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Kondisi Sosial Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
6. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Disposisi Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.
7. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Standar Dan Sasaran, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan (No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Secara Teoritis**

- 1) Menambah Ilmu Pengetahuan Melalui Penelitian Yang Dilaksanakan Sehingga Memberikan Kontribusi Pemikir Bagi Pengembangan Ilmu Administrasi Publik Khususnya.
- 2) Dapat Dijadikan Sebagai Acuan Untuk Pengembangan Ilmu Yang Terkait Dalam Masalah Tersebut. Artinya Setiap Hasil Yang Didapatkan Dari Penelitian Ini Bisa Kembangkan Menjadi Suatu Ilmu Yang Terkonsep Yang Nantinya Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Acuan Untuk Pengembangan Atau Penelitian Selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Secara Praktis**

- 1) Diharapkan Penelitian Ini Dapat Memberikan Saran Atau Masukan Guna Mengambil Langkah Yang Tepat Dalam Rangka Meningkatkan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Berujung Pada Pencemaran Lingkungan Sehingga Pemerintah Maupun Swasta Dapat Meningkatkan Kembali Peranannya Dalam Pengelolaan Sampah.
- 2) Bagi Masyarakat Penelitian Ini Diharapkan Mampu Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah Dan Diharapkan Masyarakat Dapat Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Sampah

## 1.6 Kerangka Berpikir

Menurut Dharma (2001:154), Menyebutkan Bahwa Efektivitas Merupakan Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Yang Sesuai Dengan Kuantitas, Kualitas Dan Ketepatan Waktu. Dimensi-Dimensinya Adalah Sebagai Berikut :

1. Kuantitas Yaitu Jumlah Yang Harus Diselesaikan Atau Dicapai. Pengukuran Kuantitatif Melibatkan Perhitungan Keluaran Dari Proses Atau Pelaksanaan Kegiatan. Ini Berkaitan Dengan Jumlah Keluaran Yang Dihasilkan.
2. Kualitas Yaitu Mutu Yang Harus Dihasilkan (Baik Tidaknya). Pengukuran Kualitatif Keluaran Mencerminkan Pengukuran “Tingkat Kepuasan”, Yaitu Seberapa Baik Penyelesaiannya. Ini Berkaitan Dengan Bentuk Keluaran.
3. Ketepatan Waktu Yaitu Sesuai Tidaknya Dengan Waktu Yang Direncanakan. Pengukuran Ketepatan Waktu Merupakan Jenis Khusus Dari Pengukuran Kuantitatif Yang Menentukan Ketepatan Waktu Penyelesaian Suatu Kegiatan.

Selanjutnya Terkait Implementasi Kebijakan Peneliti Menggunakan Teori Van Meter Dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) Membatasi Implementasi Kebijakan Sebagai Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Individu-Individu (Kelompok-Kelompok) Pemerintah Maupun Swasta Yang Diarahkan Untuk Mencapai Tujuan-Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Keputusan-Keputusan Sebelumnya.

Menurut Meter Dan Horn (Subarsono;2006;99) Mengemukakan Bahwa Terdapat Enam Dimensi Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi, Yakni;

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan, Di Mana Standar Dan Sasaran Kebijakan Harus Jelas Dan Terukur Sehingga Dapat Direalisasikan.
2. Sumberdaya, Dimana Implementasi Kebijakan Perlu Dukungan Sumberdaya, Baik Sumber Daya Manusia Maupun Sumber Daya Non Manusia.
3. Hubungan Antar Organisasi, Yaitu Dalam Banyak Program, Implementor Sebuah Program Perlu Dukungan Dan Koordinasi Dengan Instansi Lain, Sehingga Diperlukan Koordinasi Dan Kerja Sama Antar Instansi Bagi Keberhasilan Suatu Program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana Yaitu Mencakup Stuktur Birokrasi, Normanorma Dan Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Birokrasi Yang Semuanya Itu Akan Mempengaruhi Implementasi Suatu Program.
5. Kondisi Sosial, Politik, Dan Ekonomi. Dimensi Ini Mencakup Sumberdaya Ekonomi Lingkungan Yang Dapat Mendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan, Sejauh Mana Kelompok-Kelompok Kepentingan Memberikan Dukungan Bagi Implementasi Kebijakan, Karakteristik Para Partisipan, Yakni Mendukung Atau Menolak, Bagaimana Sifat Opini Public Yang Ada Di Lingkungan, Serta Apakah Elite Politik Mendukung Implementasi Kebijakan.
6. Disposisi Implementor Yang Mencakup Tiga Hal Yang Penting, Yaitu Respon Implementor Terhadap Kebijakan, Yang Akan Mempengaruhi Kemauannya Untuk Melaksanakan Kebijakan, Kognisi Yaitu Pemahaman Terhadap Kebijakan, Intensitas Disposisi Implementor, Yaitu Preferensi Nilai Yang Dimiliki Oleh Implementor.



*Sumber: Diolah peneliti tahun 2017*

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:70) Yang Mengatakan Bahwa:

“Hipotesis Merupakan Jawaban Sementara Terhadap Rumusan Masalah Penelitian, Dimana Rumusan Masalah Penelitian Telah Dinyatakan Dalam Bentuk Pertanyaan. Dikatakan Sementara Karena Jawaban Yang Diberikan Baru Didasarkan Pada Fakta-Fakta Yang Empiris Yang Diperoleh Melalui Pengumpulan Data. Jadi Hipotesis Juga Dapat Dinyatakan Sebagai Jawaban Teoritis Terhadap Rumusan Masalah Penelitian, Belum Jawaban Empirik.”

Bentuk Hipotesis Yang Penulis Ajukan Adalah Hipotesis Asosatif. Hipotesis Asosiatif Adalah Jawaban Sementara Terhadap Rumusan Masalah Asosiatif, Yaitu Yang Menyatakan Hubungan Antara Dua Variabel Atau Lebih.

(Sugiyono, 2011:77) Berdasarkan Kerangka Pemikiran Di Atas, Peneliti Mengajukan Hipotesis Sebagai Berikut:

1.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Standar Dan Sasaran Kebijakan ( $X_1$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

$H_o$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Standar Dan Sasaran Kebijakan ( $X_1$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

2.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Sumberdaya ( $X_2$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

$H_o$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Sumberdaya ( $X_2$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

3.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Hubungan Antar Organisasi ( $X_3$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

$H_o$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Hubungan Antar Organisasi ( $X_3$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

4.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Karakteristik ( $X_4$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

- $H_0$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Karakteristik ( $X_4$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).
5.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi ( $X_5$ ) Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).
- $H_0$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi ( $X_5$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).
6.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Disposisi ( $X_6$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).
- $H_0$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Disposisi ( $X_6$ ) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).
7.  $H_a$  : Ada Pengaruh Dari Standar Dan Sasaran, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (X) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

$H_0$  : Tidak Ada Pengaruh Dari Standar Dan Sasaran, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik, Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (X) Terhadap Efektivitas Kebersihan Di Kota Bandung (Y).

